Journal of International Relations (JoS)
E-ISSN 2828-1667 Vol 1 No 2, September 2026
DOI PREFIKS 10.36232

Analisis Peran International Labour Organization (ILO) dalam Eksploitasi Buruh Garmen Perempuan dan Anak di Bangladesh 2020-2025

Nur Isabeella Orocomna [1]*, Etik Siwati Ningrum [2], Nurinaya [3]

[1] Universitas Pendidikan Muhamadiyah Sorong, Indonesia
[2] Universitas Pendidikan Muhamadiyah Sorong, Indonesia
[3] Universitas Pendidikan Muhamadiyah Sorong, Indonesia

Email korespondensi : nurisabellaorocomna@gmail.com

Abstract
This study analyzes the role of the International Labour Organization (ILO) in addressing the exploitation of female and child garment workers in Bangladesh during the 2021-2025 period. Bangladesh's large export-oriented garment industry faces serious issues such as low wages, excessive working hours, gender discrimination, sexual harassment, and child labor. Although Bangladesh has ratified ILO conventions related to labor standards, implementation encounters structural barriers including weak oversight, patriarchal culture, and economic pressure from the global fast fashion model. The ILO acts as a norm setter, social dialogue facilitator, and executor of operational programs like Better Work Bangladesh. This study also applies feminist international relations theory to analyze gender inequality and patriarchal structures worsening exploitation. Findings indicate that while the ILO's role is significant, it is limited by structural and domestic political factors, requiring political commitment, corporate compliance, and national institutional improvements for effective reform.

Keywords: *International Labour Organization, Labor Exploitation, Female Garment Workers, Bangladesh, Fast Fashion*

Abstrak
Penelitian ini menganalisis peran International Labour Organization (ILO) dalam menangani eksploitasi buruh garmen perempuan dan anak di Bangladesh periode 2021-2025, industri garmen Bangladesh yang besar dan berorientasi ekspor menghadirkan berbagai persoalan serius seperti upah rendah, jam kerja berlebih, diskriminasi gender, pelecehan seksual, dan pekerja anak. Meskipun Bangladesh telah meratifikasi konvensi ILO terkait ketenagakerjaan, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural yang melibatkan lemahnya pengawasan, budaya patriarki, dan tekanan ekonomi dari model fast fashion global. ILO berperan sebagai pembentuk norma, fasilitator dialog sosial, dan pelaksana program operasional seperti Better Work Bangladesh. Penelitian ini juga menggunakan teori feminisme hubungan internasional untuk menganalisis ketimpangan gender dan struktur patriarki yang memperparah eksploitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ILO penting namun terbatas oleh faktor struktural dan politik domestik, sehingga reformasi yang efektif memerlukan komitmen politik, kepatuhan perusahaan, dan perbaikan kelembagaan nasional.

Kata Kunci: International Labour Organization, Eksploitasi Buruh, Buruh Garmen Perempuan, Bangladesh, Fast Fashion

Journal of International Relations (JoS)
E-ISSN 2828-1667 Vol 1 No 2, September 2026
DOI PREFIKS 10.36232

Pendahuluan

Bangladesh adalah negara berkembang utama dan merupakan pusat industri fast fashion global. Bangladesh dikenal sebagai salah satu pusat produksi fast fashion terbesar di dunia, dengan industri garmen yang menjadi tulang punggung ekonomi negara ini. Industri ready-made garment (RMG) terbesar kedua di dunia, setelah Tiongkok di Bangladesh telah berkembang pesat, serta mempekerjakan jutaan pekerja, di mana 80% di antaranya adalah perempuan. Keunggulan Bangladesh dalam fast fashion terletak pada biaya produksi yang sangat rendah, yang memungkinkan merek-merek global membeli produk dengan harga sangat murah, menghasilkan margin keuntungan besar bagi retailer global.[1]

Buruh garmen di Bangladesh berkaitan erat dengan perkembangan pesat industri garmen yang menjadi tulang punggung ekonomi negara tersebut. Industri garmen di Bangladesh adalah salah satu yang terbesar di dunia, bahkan menempati posisi kedua setelah China dalam ekspor produk tekstil dan garmen. Bangladesh saat ini merupakan pengekspor garmen terbesar kedua di dunia, hanya di belakang China. Pekerja garmen perempuan di Bangladesh dengan cepat menjadi wajah publik industri ini, dianggap sebagai kisah sukses global dalam hal mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan perempuan melalui kebijakan pembangunan berorientasi ekspor.[2]

Pertumbuhan industri ini membawa dampak ekonomi dan sosial yang signifikan, seperti peningkatan produktivitas dan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Namun, di balik itu terdapat berbagai masalah serius terkait eksploitasi buruh, pelanggaran hak asasi manusia, dan kondisi kerja yang buruk. Buruh garmen di Bangladesh sering menghadapi jam kerja yang sangat panjang, upah rendah yang seringkali tidak sesuai standar, serta kondisi kerja yang tidak aman dan tidak sehat.[3]

---

[1] Md. Saheb Ali Mondal, Mohammad Main Uddin, and Nazma Akter, 'The Textile Industry in Bangladesh: Growth Trends, Challenges, and Future Prospects', *Global Disclosure of Economics and Business*, 13.2 (2025), 73–86 <https://doi.org/10.18034/gdeb.v13i2.789>.

[2] Kawsar Uddin Hossain, Md. Akram | Mahmud, 'Bangladesh's Ready-Made Garment Industry in the Era of Sustainable Development: A Triple Bottom Line Appraisal | Branża Gotowych Wyrobów Odzieżowych w Bangladeszu w Erze Zrównoważonego Rozwoju: Ocena Potrójnej Linii Wyników (TBL)', 2025 <https://agris.fao.org/search/en/providers/126089/records/691ddb4249e41686f79329ca>.

[3] Amnesty Internasional, 'Bangladesh: Amnesty International Calls for Immediate Justice for Garment Workers amid Ongoing Repression & State-Sanctioned Crackdowns on Workers' Rights, Incl. Key Union Leaders, on Intl Workers' Day', *Amnesty Internasional*, 2024 <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/bangladesh-amnesty-international-urges-immediate-justice-for-bangladesh-garment-workers-amid-ongoing-repression-and-state-sanctioned-crackdowns-on-workers-rights/>.

Eksploitasi buruh garmen di Bangladesh merupakan isu yang kompleks dan kronis, yang berakar pada struktur ekonomi kapitalis dan tekanan pasar fast fashion global. Industri garmen di Bangladesh berkembang pesat sebagai salah satu eksportir terbesar dunia, terutama karena biaya produksi yang sangat rendah dan ketersediaan tenaga kerja murah, yang sebagian besar adalah perempuan. Pertumbuhan ini sering kali mengorbankan hak-hak buruh, dengan kondisi kerja yang sangat buruk, upah rendah, jam kerja panjang, serta minimnya perlindungan keselamatan kerja.[4]

Pekerja perempuan di sektor tekstil sebagian besar dipekerjakan pada posisi bawahan dan bergaji rendah, sebagian besar dari mereka adalah perempuan muda dari daerah pedesaan yang terpaksa pindah ke kota untuk mencari nafkah karena pendidikan yang buruk dan kurangnya lapangan kerja di daerah pedesaan[5]. Mereka seringkali menjadi satu-satunya pencari nafkah bagi anak-anak dan suami mereka, yang seringkali menganggur. Selain kondisi kerja yang eksploitatif dan tingkat stres fisik yang tinggi, pekerja perempuan sering menghadapi kekerasan dan pelecehan berbasis gender.[6]

Pemerintah Bangladesh telah menetapkan beberapa regulasi seperti Labour Act 2006 yang mengatur jam kerja, upah minimum, dan hak buruh untuk berserikat. Namun, penegakan hukum masih lemah sehingga pelanggaran terhadap hak buruh terus terjadi. Kondisi ini diperparah oleh tekanan dari perusahaan multinasional yang memanfaatkan biaya tenaga kerja rendah dan kepadatan penduduk yang tinggi sebagai keunggulan kompetitif.[7]

International Labour Organization (ILO) merupakan salah satu badan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki tugas untuk memperjuangkan dan memajukan kesempatan bagi masyarakat dunia agar mendapatkan hak yang sama dalam pekerjaan. ILO seringkali menekankan bahwa pria maupun wanita harus mendapatkan pekerjaan dengan kondisi yang layak, aman, setara, dan produktif. Hal ini ada dalam agenda yang dijalankan oleh ILO. Badan ini memiliki beragam bentuk konvensi atau perjanjian

[4] Mikael Witarka, Mohammad Rosyidin, and Satwika Paramasatya, 'Dibalik Model Kerja Fast Fashion: Pengaruh Inditex Terhadap Eksploitasi Buruh Garmen Di Bangladesh', *Journal of International Relations*, 8 (2022), 419–26 <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id>.
[5] Nurinaya, Karmila Sinen, Tri Handayani, Indigenous Papuan Women Under Patriarchal Socio-Political Systems: Marginalization In International Relations And Indigenous Peoples Politics, Journal of Government Science Studies, 2026. Hal 163-173.
[6] Witarka, Rosyidin, and Paramasatya.
[7] Mawaddah Fauziah, 'Munculnya Eksploitasi Buruh Garmen Dalam Proses Industrialisasi Bangladesh', 2015, 1–11 <https://www.academia.edu/38820811/Munculnya_Eksploitasi_Buruh_Garmen_Bangladesh>.

internasional yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Konvensi yang dikeluarkan pada tahun 1958, konvensi ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi para pekerja dan hak-hak kerja yang harus mereka dapatkan.[8]

Konvensi yang dikeluarkan oleh ILO pada tahun 1958 berkaitan dengan diskriminasi yang terjadi dalam pekerjaan. Konvensi ini dibuat karena maraknya kasus diskriminasi dalam bidang pekerjaan, termasuk pelanggaran hak pekerja. Konvensi ILO tahun 1958 memiliki 14 pasal yang dibuat sebagai upaya dalam pencegahan terjadinya diskriminasi. Penjelasan istilah diskriminasi dijelaskan dalam pasal satu, yaitu disebutkan bahwa diskriminasi terjadi ketika masyarakat tidak mendapatkan kesempatan kerja dan perlakuan yang sama karena adanya perbedaan ras, jenis kelamin, agama, warna kulit dan perbedaan lainnya. Pada pasal dua dan enam dijelaskan bahwa setiap anggota negara yang telah menandatangani konvensi ini diwajibkan untuk membuat s uatu kebijakan nasional yang bertujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dalam bidang pekerjaan dan jabatan. Kebijakan yang telah dibuat harus diberlakukan pada seluruh wilayah, termasuk wilayah non-metropolitan.[9]

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (literature review). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan untuk memahami fenomena secara mendalam dengan menganalisis data nonnumerik. Metode ini dapat digunakan untuk mempelajari bagaimana Analisis Peran International Labour Organisation (ILO) Dalam Masalah Eksploitasi Buruh Garmen Di Bangladesh. Jenis penelitian ini adalah studi literatur (literature review), Penelitian literatur ini bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data sekunder yang relevan. Tinjauan literatur ini mencakup jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, dokumen kebijakan ILO, laporan NGO, dan media yang berkaitan dengan topik penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Eksploitasi Buruh Garmen Perempuan di Bangladesh

Industri Ready-Made Garment (RMG) merupakan sektor manufaktur terbesar di Bangladesh yang menjadi penyumbang utama devisa negara. Industri ini

[8] Ratih Dinda Apsari, Sri Yuniati, and Suyani Indriastuti, 'Penerapan Konvensi ILO Pada Industri Garmen Bangladesh (Studi Kasus: Diskriminasi Pekerja Garmen Perempuan)', *E-Sospol*, 9.3 (2022), 168 <https://doi.org/10.19184/e-sos.v9i3.32842>.
[9] Apsari, Yuniati, and Indriastuti.

mempekerjakan lebih dari 4 juta tenaga kerja, dengan sekitar 60–80% di antaranya merupakan perempuan. Besarnya keterlibatan perempuan dalam industri garmen menjadikan sektor ini sebagai salah satu sumber pemberdayaan ekonomi perempuan di Bangladesh, dominasi pekerja perempuan juga memperlihatkan tingginya tingkat kerentanan terhadap eksploitasi tenaga kerja.[10]

Eksploitasi terhadap buruh perempuan terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain upah yang rendah, jam kerja yang melebihi ketentuan, kondisi kerja yang tidak aman, diskriminasi berbasis gender, pelecehan seksual, serta pembatasan hak untuk berserikat. Struktur produksi industri garmen Bangladesh dibangun berdasarkan keunggulan biaya tenaga kerja yang murah sehingga perusahaan cenderung menekan biaya produksi melalui efisiensi tenaga kerja, perempuan sebagai kelompok pekerja terbesar menjadi pihak yang paling terdampak oleh praktik eksploitasi tersebut.[11]

Model bisnis fast fashion semakin memperkuat eksploitasi tersebut. Perusahaan multinasional menuntut harga produksi yang rendah, siklus produksi yang cepat, dan volume produksi yang tinggi. Kondisi tersebut mendorong pabrik-pabrik di Bangladesh meningkatkan target produksi dengan jam kerja yang panjang dan tekanan kerja yang tinggi, sementara kesejahteraan pekerja tetap rendah.[12]

Tragedi Rana Plaza sebagai Titik Balik Reformasi Ketenagakerjaan

Tragedi runtuhnya Rana Plaza menjadi simbol kegagalan sistem perlindungan tenaga kerja di Bangladesh. Runtuhnya gedung yang menampung beberapa pabrik garmen tersebut menyebabkan 1.138 pekerja meninggal dunia dan sekitar 2.600 pekerja mengalami luka-luka. Sebagian besar korban merupakan perempuan karena mayoritas pekerja pada lini produksi adalah perempuan. Tragedi ini menunjukkan bahwa kepentingan produksi lebih diutamakan dibandingkan keselamatan pekerja.[13]

Peristiwa tersebut memicu perhatian internasional terhadap kondisi ketenagakerjaan di Bangladesh dan mendorong reformasi regulasi keselamatan kerja. Selain itu, tragedi Rana Plaza memperlihatkan bahwa ratifikasi konvensi

[10] Georgia Bynum, 'Dampak Fast Fashion Di Bangladesh', *The Borgen Project*, 2021 <https://borgenproject.org/fast-fashion-in-bangladesh/>.
[11] Isti Fauziah Bakhtiar, 'Implementation of the European Union ' S Sustainable Textiles Strategy in Mitigating Ecological Impacts and Labour Exploitation', 2024.
[12] Witarka, Rosyidin, and Paramasatya.
[13] Mohammed Shamsul Alam, 'Dampak Tren Mode Musiman Mikro Pada Industri Garmen Di Bangladesh', *Scientific Research*, 2023 <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=129042>.

internasional belum menjamin implementasi perlindungan pekerja apabila tidak diikuti dengan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.[14]

Implementasi Konvensi ILO terhadap Perlindungan Buruh Garmen Perempuan di Bangladesh

Bangladesh merupakan salah satu negara anggota International Labour Organization (ILO) yang telah meratifikasi sejumlah konvensi fundamental terkait perlindungan tenaga kerja, termasuk Konvensi No. 100 tentang Equal Remuneration dan Konvensi No. 111 tentang Discrimination (Employment and Occupation). Ratifikasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah Bangladesh untuk menyesuaikan sistem ketenagakerjaannya dengan standar internasional. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kedua konvensi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, terutama pada sektor industri Ready-Made Garment (RMG) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.[15]

Sebagai organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan, International Labour Organization menjalankan beberapa fungsi utama dalam menangani eksploitasi buruh di Bangladesh. Pertama, ILO menjalankan fungsi normatif melalui penyusunan standar ketenagakerjaan internasional, termasuk Konvensi No. 100 mengenai kesetaraan upah dan Konvensi No. 111 mengenai penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan. Kedua, ILO menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi konvensi yang telah diratifikasi Bangladesh. Ketiga, ILO memberikan bantuan teknis melalui berbagai program peningkatan kapasitas ketenagakerjaan, termasuk program Better Work Bangladesh yang bertujuan meningkatkan keselamatan kerja, kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan, serta produktivitas industri.[16]

ILO memfasilitasi dialog sosial tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja sebagai mekanisme penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan hubungan industrial yang lebih seimbang sekaligus memperkuat perlindungan terhadap

[14] Fathira Rachma, Calista Sahlah Purwanto, and Fanita, 'EKSPLOITASI BURUH GARMEN DI BANGLADESH OLEH KORPORASI MULTINASIONAL', 4.4 (2025), 215–27.
[15] Sindi Lestari, 'Pelaksanaan Fungsi International Labour Organization (Ilo) Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menangani Masalah Ketenagakerjaan Akibat Covid-19 Di Indonesia', 3 (2023), 125–31.
[16] Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 'Tinjauan Umum Tentang International Labour Organization(ILO)', 2.1987 (2024), 306–12.

pekerja perempuan.[17]

ILO menjalankan beberapa fungsi utama sebagai organisasi internasional; Pertama, fungsi normatif, yaitu menetapkan standar ketenagakerjaan internasional melalui berbagai konvensi yang menjadi acuan negara anggota. Kedua, fungsi asistensi teknis, yaitu membantu pemerintah Bangladesh melakukan reformasi regulasi ketenagakerjaan melalui penyusunan kebijakan, pelatihan pengawas ketenagakerjaan, dan peningkatan kapasitas lembaga pemerintah. Ketiga, fungsi pengawasan, yaitu memonitor implementasi konvensi yang telah diratifikasi Bangladesh melalui mekanisme pelaporan dan evaluasi berkala. Keempat, fungsi dialog sosial tripartit, yaitu mempertemukan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk membahas penyelesaian persoalan ketenagakerjaan.[18]

Pasca tragedi Rana Plaza, ILO bersama pemerintah Bangladesh, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja mengembangkan berbagai program reformasi, termasuk peningkatan inspeksi bangunan, keselamatan kerja, dan penguatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan.[19]

Analisis Berdasarkan Teori Feminisme

Berdasarkan teori feminisme, eksploitasi buruh perempuan di Bangladesh tidak hanya disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, tetapi juga merupakan konsekuensi dari struktur ekonomi global yang berbasis pada pembagian kerja menurut gender (gendered division of labor)[20]. Perempuan ditempatkan pada pekerjaan dengan upah rendah, keterampilan yang dianggap sederhana, dan posisi tawar yang lemah. Kondisi tersebut menyebabkan perempuan menjadi kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi dalam rantai pasok industri fast fashion.[21]

Melalui perspektif feminisme, dapat dipahami bahwa dominasi perempuan dalam industri garmen bukan semata-mata karena tingginya partisipasi perempuan

[17] Bangladesh's Referendum and Reforms, 'Dinamika Peran Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Dalam Mitigasi Eksploitasi Buruh Perempuan Dan Anak Pada Ekosistem Fast Fashion Di Bangladesh Tata Kelola Hukum Dan Road Map Sektor Tenaga Kerja', 2025.
[18] 'International Labour Organization (ILO)', *Kemlu.Go.Id*, 2022 <https://kemlu.go.id/daftar-kerja-sama-multilateral/international-labour-organization-ilo?type=publication>.
[19] Ratih Ananda Putri, . Idris, and Agus Pratiwi, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Diskriminasi Kesempatan Mendapatkan Upah Bagi Tenaga Kerja Perempuan Di Indonesia', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3.2 (2019), 259–78 <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.20>.
[20] Nurinaya Nurinaya, Etik Siswatiningrum, Signifikansi Peran Perempuan Adat Papua Dalam Upaya Iklim Berkelanjutan JOSH: Journal of Sharia, 2025.Hal 21-37.
[21] Akash/Panos, '"Whoever Raises Their Head Suffers the Most" Workers' Rights in Bangladesh's Garment Factories', *Human Righ Watch*, 2015 <https://www.hrw.org/report/2015/04/22/whoever-raises-their-head-suffers-most/workers-rights-bangladeshs-garment>.

dalam dunia kerja, melainkan karena perusahaan memandang perempuan sebagai tenaga kerja yang lebih mudah dikendalikan, lebih teliti, serta bersedia menerima upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, eksploitasi yang terjadi merupakan hasil interaksi antara sistem kapitalisme global, budaya patriarki, dan lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan.[22]

Dari perspektif Teori Feminisme, dominasi perempuan dalam industri garmen bukan merupakan bentuk pemberdayaan sepenuhnya, tetapi mencerminkan pembagian kerja berbasis gender (gendered division of labor), di mana perempuan ditempatkan pada pekerjaan dengan upah rendah, posisi tawar lemah, dan tingkat kerentanan yang tinggi. Dengan demikian, meskipun implementasi Konvensi ILO No.100 dan No.111 telah memberikan kemajuan terhadap perlindungan hak-hak pekerja perempuan, eksploitasi belum dapat dihilangkan sepenuhnya karena dipengaruhi oleh struktur ekonomi politik global dan kepentingan industri yang berorientasi pada efisiensi biaya produksi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa International Labour Organization (ILO) memiliki peran yang signifikan dalam menangani eksploitasi buruh garmen perempuan dan anak di Bangladesh selama periode 2020–2025, baik melalui pembentukan standar ketenagakerjaan internasional maupun melalui pendampingan implementasi kebijakan di tingkat nasional. Peran tersebut diwujudkan melalui penyusunan dan pengawasan pelaksanaan konvensi ketenagakerjaan, khususnya Konvensi No. 100 tentang Equal Remuneration dan Konvensi No. 111 tentang Discrimination (Employment and Occupation), pemberian asistensi teknis kepada pemerintah Bangladesh, penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan, serta fasilitasi dialog sosial tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Selain itu, ILO juga berkontribusi dalam berbagai program peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk melalui inisiatif Better Work Bangladesh yang bertujuan memperbaiki kondisi kerja di sektor garmen.

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran ILO masih menghadapi berbagai keterbatasan, eksploitasi terhadap buruh perempuan masih ditemukan dalam bentuk upah yang belum memenuhi kebutuhan hidup layak, jam kerja yang panjang,

[22] Rachma, Purwanto, and Fanita.

diskriminasi dalam kesempatan promosi, pelecehan dan intimidasi di tempat kerja, serta kondisi kerja yang belum sepenuhnya aman. Di sisi lain, praktik pekerja anak masih ditemukan terutama pada unit produksi informal dan rantai subkontrak yang pengawasannya lebih lemah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ratifikasi konvensi ILO belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang efektif di tingkat nasional.

Dapat disimpulkan bahwa ILO telah berperan penting sebagai katalis reformasi ketenagakerjaan di Bangladesh selama periode 2020–2025, tetapi belum sepenuhnya mampu menghapus eksploitasi terhadap buruh garmen perempuan dan anak. Hambatan berupa lemahnya penegakan hukum, tekanan industri fast fashion global, ketergantungan ekonomi Bangladesh pada sektor garmen, serta ketimpangan gender yang bersifat struktural menyebabkan perlindungan terhadap buruh masih belum optimal. Oleh karena itu, upaya penghapusan eksploitasi memerlukan sinergi yang lebih kuat antara ILO, pemerintah Bangladesh, perusahaan multinasional, serikat pekerja, dan masyarakat internasional agar standar kerja layak dapat diterapkan secara konsisten di seluruh rantai pasok industri garmen.a.

Referensi

Akash/Panos, '"Whoever Raises Their Head Suffers the Most" Workers' Rights in Bangladesh's Garment Factories', *Human Righ Watch*, 2015 <https://www.hrw.org/report/2015/04/22/whoever-raises-their-head-suffers-most/workers-rights-bangladeshs-garment>

Alam, Mohammed Shamsul, 'Dampak Tren Mode Musiman Mikro Pada Industri Garmen Di Bangladesh', *Scientific Research*, 2023 <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=129042>

Amnesty Internasional, 'Bangladesh: Amnesty International Calls for Immediate Justice for Garment Workers amid Ongoing Repression & State-Sanctioned Crackdowns on Workers' Rights, Incl. Key Union Leaders, on Intl Workers' Day', *Amnesty Internasional*, 2024 <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/bangladesh-amnesty-international-urges-immediate-justice-for-bangladesh-garment-workers-amid-ongoing-repression-and-state-sanctioned-crackdowns-on-workers-rights/>

Apsari, Ratih Dinda, Sri Yuniati, and Suyani Indriastuti, 'Penerapan Konvensi ILO Pada Industri Garmen Bangladesh (Studi Kasus: Diskriminasi Pekerja Garmen Perempuan)', *E-Sospol*, 9 (2022), 168 <https://doi.org/10.19184/e-sos.v9i3.32842>

Bakhtiar, Isti Fauziah, 'Implementation of the European Union ' S Sustainable Textiles Strategy in Mitigating Ecological Impacts and Labour Exploitation', 2024

Bynum, Georgia, 'Dampak Fast Fashion Di Bangladesh', *The Borgen Project*, 2021 <https://borgenproject.org/fast-fashion-in-bangladesh/>

Fauziah, Mawaddah, 'Munculnya Eksploitasi Buruh Garmen Dalam Proses Industrialisasi Bangladesh', 2015, 1–11 <https://www.academia.edu/38820811/Munculnya_Eksploitasi_Buruh_Garmen_Bangladesh>

Hossain, Md. Akram | Mahmud, Kawsar Uddin, 'Bangladesh's Ready-Made Garment Industry in the Era of Sustainable Development: A Triple Bottom Line Appraisal | Branża Gotowych Wyrobów Odzieżowych w Bangladeszu w Erze Zrównoważonego Rozwoju: Ocena Potrójnej Linii Wyników (TBL)', 2025 <https://agris.fao.org/search/en/providers/126089/records/691ddb4249e41686f79329ca>

'International Labour Organization (ILO)', *Kemlu.Go.Id*, 2022 <https://kemlu.go.id/daftar-kerja-sama-multilateral/international-labour-organization-ilo?type=publication>

Lestari, Sindi, 'Pelaksanaan Fungsi International Labour Organization (Ilo) Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menangani Masalah Ketenagakerjaan Akibat Covid-19 Di Indonesia', 3 (2023), 125–31

Mondal, Md. Saheb Ali, Mohammad Main Uddin, and Nazma Akter, 'The Textile Industry in Bangladesh: Growth Trends, Challenges, and Future Prospects', *Global Disclosure of Economics and Business*, 13 (2025), 73–86 <https://doi.org/10.18034/gdeb.v13i2.789>

Nurinaya, Karmila Sinen, Tri Handayani, Indigenous Papuan Women Under Patriarchal Socio-Political Systems: Marginalization In International Relations And Indigenous Peoples Politics, Journal of Government Science Studies, 2026. Hal 163-173.

Nurinaya, Etik Siswatiningrum, Signifikansi Peran Perempuan Adat Papua Dalam Upaya Iklim Berkelanjutan JOSH: Journal of Sharia, 2025.Hal 21-37.

Putri, Ratih Ananda, . Idris, and Agus Pratiwi, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Diskriminasi Kesempatan Mendapatkan Upah Bagi Tenaga Kerja Perempuan Di Indonesia', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3 (2019), 259–78 <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.20>

Rachma, Fathira, Calista Sahlah Purwanto, and Fanita, 'EKSPLOITASI BURUH GARMEN DI BANGLADESH OLEH KORPORASI MULTINASIONAL', 4 (2025), 215–27

Reforms, Bangladesh's Referendum and, 'Dinamika Peran Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Dalam Mitigasi Eksploitasi Buruh Perempuan Dan Anak Pada Ekosistem Fast Fashion Di Bangladesh Tata Kelola Hukum Dan Road Map Sektor Tenaga Kerja', 2025

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya, 'Tinjauan Umum Tentang International Labour Organization(ILO)', 2 (2024), 306–12

Witarka, Mikael, Mohammad Rosyidin, and Satwika Paramasatya, 'Dibalik Model Kerja Fast Fashion: Pengaruh Inditex Terhadap Eksploitasi Buruh Garmen Di Bangladesh', *Journal of International Relations*, 8 (2022), 419–26 <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id>